

PENDIDIKAN KARAKTER DAN KEBUTUHAN PASRAMAN FORMAL

Oleh:

I NYOMAN YOGA SEGARA

Program Pascasarja Program Studi Ilmu Komunikasi Hindu
Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
E-mail: yogasegara@yahoo.com

Abstract

This article is written with the approach of the literature review about the character education and formal Pasraman. In much of the literatures, including the views of experts, character education and its transformation in learning are so complex, especially when faced with the question of how these ideals can be educated holistically. For that reason, this article only generally describes what is character education. Probes for character education in the Hindu was also associated only with characters inspired by some of the characters in the epic. In another word, it is done merely to focus and simplify to understand. Finally, this article came to the conclusion how character education can be organized through Formal Pasraman even other religious education. In the Formal Pasraman, the learning base is the spirit of teacher-student relationship, collective living in a dorm, as well as materials based on the value of ethics, morality and manners will be implemented. Another significant thing is the active involvement and participation of parents and communities in the implementation of Formal Pasraman. Interpedence of all components like this necessitates the birth of Hindu human who has a religious character, extensive knowledge, good moral.

Key words: character education, formal pasraman, manner

Abstrak

Artikel ini adalah hasil pemikiran yang ditulis dengan pendekatan kajian pustaka tentang pendidikan karakter dan pasraman formal. Dalam banyak literatur, termasuk pandangan para ahli, pendidikan karakter dan transformasinya dalam pembelajaran begitu kompleks, terutama ketika dihadapkan pada pertanyaan bagaimana cita-cita ini dapat dididikkan secara holistik. Atas alasan tersebut, artikel ini hanya mendeskripsikan secara umum apa yang dimaksud pendidikan karakter. Penelusuran terhadap pendidikan karakter dalam Hindu juga hanya dikaitkan dengan karakter-karakter yang diinspirasi oleh beberapa tokoh dalam wiracarita. Cara ringan ini, sekali lagi, dilakukan semata agar menjadi fokus dan sederhana memahaminya. Akhirnya, artikel ini sampai pada simpulan bahwa imajinasi tentang bagaimana pendidikan karakter dapat diselenggarakan melalui Pasraman Formal, di samping pendidikan keagamaan lainnya. Di dalam Pasraman Formal, ruh pembelajaran yang berbasis hubungan *guru-sisya*, hidup kolektif di alam dalam satu asrama, serta materi berlandaskan nilai etika, ajaran moralitas dan budi pekerti akan dilaksanakan. Hal penting lainnya adalah keterlibatan aktif dan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pelaksanaan Pasraman Formal. Interpedensi dari semua komponen seperti ini akan meniscayakan lahirnya manusia Hindu yang berkarakter-religius: luas pengetahuan, tinggi akhlak!

Kata Kunci: pendidikan karakter, pasraman formal, budi pekerti

I. PENDAHULUAN

Setelah berjuang begitu lama, penuh onak dan duri, akhirnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu resmi ditandatangani. Mimpi umat Hindu untuk memiliki institusi formal untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Hindu terwujud, meskipun gagasan ini jauh sebelumnya telah dituangkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bagian Ke Sembilan Pasal 30. Penjelasan serupa ditemukan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Bab III Pendidikan Keagamaan, terutama Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Bagian Ke Empat Pendidikan Keagamaan Hindu Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41.

Lahirnya PMA 56/2014 tidak lepas dari kerjasama Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat dengan Direktorat Pendidikan Agama Hindu, Ditjen Bimas Hindu. Inspirasi kelahiran PMA diawali saat Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan pada 2012 melakukan survei terhadap penyelenggaraan pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Khusus untuk Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Hindu, salah satu hasil survei menggambarkan memperlihatkan bahwa sebagian besar pasraman (64,46%) telah melaksanakan mata pelajaran keagamaan “lebih banyak” jika dibandingkan dengan mata pelajaran umum (Laporan Penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2012).

Simpulan akhir dari analisis terhadap data survei tersebut, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan merekomendasikan untuk: *pertama*, perlu dikembangkan pendidikan keagamaan Hindu yang lebih difokuskan melalui Pasraman Formal ketimbang dengan *Pesantian* dan *Sad Dharma*, dan *kedua*, pasraman yang ada selama ini dapat dikembangkan menjadi pendidikan keagamaan Hindu melalui jalur formal. Rekomendasi ini ditindaklanjuti dengan penyusunan Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Pasraman Formal (Muin dkk, 2012:3). Sebagian besar isi pedoman ini menjadi substansi utama PMA 56/2014.

Kehadiran PMA 56/2014 menjadi momentum untuk menjalankan fungsi pendidikan keagamaan, yaitu mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama, serta bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia (Muin, 2012:2). Pasraman Formal, dengan demikian menjadi tempat pembentukan sumber daya manusia (SDM) Hindu yang berkarakter kuat sekaligus pada saat bersamaan bermoral serta religius.

Artikel ini akan mendiskusikan kembali sejauhmana Pasraman Formal dapat memenuhi harapan besar di atas, bukan sekadar imajiner. Diskusi ini juga masih pada tahap konseptual mengingat dua hal, Pasraman Formal belum didirikan dan substansinya—*Struktur Kurikulum, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar*,

Silabus, Bahan Ajar—sedang dipersiapkan. Berdasarkan alasan ini, artikel ini berorientasi prediktif dan spekulatif atau semacam proyeksi yang dihidupi sejumlah gagasan positif di dalamnya. Hasilnya bisa diuji ketika semua hal tentang Pasraman Formal sudah diselenggarakan. Preposisi ini “terpaksa” dibangun karena belum mendapat justifikasi dari hasil penelitian dengan tema serupa. Dalam menyajikan analisis, artikel ini dikerjakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan digolongkan sebagai penelitian kepustakaan. Data primer artikel ini lebih banyak bersumber dari regulasi dan literatur lain yang relevan.

II. PEMBAHASAN

2.1 Pendidikan Karakter: apa dan bagaimana?

Bangsa yang kuat disokong oleh karakter manusianya, dan hanya bangsa yang berkarakter kuat yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat. Adagium ini adalah satu dari sekian banyak alasan mengapa kita sepakat untuk memiliki keinginan yang sama, tanpa kecuali, sebagaimana dimaktubkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-2 dengan pernyataan yang sangat tegas, “...mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Melalui pernyataan ini, para *founding fathers* menyadari bahwa hanya dengan menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, bangsa ini dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain (lihat juga CST Kansil, 1979).

Secara historis, keinginan tersebut mengalasi onak duri perjalanan bangsa ini. Sebut saja ketika masa Orde Lama, Soekarno dengan gaya khasnya selalu mengobarkan semangat rakyatnya untuk menjadi bangsa yang berkarakter dan berdikari. Ajakan ini diformulasikan ke dalam falsafah Trisakti, yaitu kemandirian di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Untuk bisa mengais cita-cita besar ini, Ia mencanangkan *nation and character building* di mana Pembangunan Semesta Berencana mengamanatkan karakter sebagai *mental investment*. Kini, oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo ruh *nation and character building* diartikulasikan ke dalam “Gerakan Revolusi Mental”.

Pada masa Orde Baru, keinginan untuk menjadi bangsa yang berkarakter juga semakin menguat. Soeharto menginginkan bangsa Indonesia harus kokoh dengan bersenden nilai-nilai Pancasila. Keinginan ini digalakkan secara massif melalui penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Meskipun harus diakui pbumian nilai-nilai Pancasila sebagaimana dipikirkan Fatah dan Hardani (2011) yang jauh panggang dari api. Sedangkan pada Orde Reformasi, keinginan membangun karakter bangsa juga terus berkobar bersamaan dengan menggelindingnya euforia politik sebagai dialektika dari runtuhnya rezim Orde Baru. Karakter bangsa lalu ditransformasikan sebagai bangsa yang demokratis, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), menghargai perbedaan, kesetaraan dan taat hukum.

Jika ditarik ke belakang, baik secara historis maupun sosio-kultural, *nation and character building* sesungguhnya adalah

komitmen nasional yang telah lama tumbuh dan berkembang. Namun dalam praksis politik pembangunan, perhatian terhadap pembangunan karakter bangsa masih belum mendapat porsi besar sehingga nirhasil dari ekspektasi banyak orang. Beberapa fenomena sosial sebagai buah dari *low trust society* dengan kecenderungan perilaku *self-destructive* telah menunjukkan masih jamaknya perilaku masyarakat yang belum sejalan dengan karakter bangsa yang dijiwai nilai adi luhung Pancasila, keadaban lokalitas dan nilai agama. Situasi serupa juga merembes ke dunia pendidikan.

Kita sepakat bahwa implikasi negatif dari fenomena sosial tersebut harus dibendung sebab jika terlanjur menjadi “wabah penyakit” akan berpotensi menihilkan kembali cita-cita bangsa. Ini tentu sangat berbahaya. Kalimat reflektif A.D Pirous yang disematkan dalam karya lukisnya berjudul *The Nightmare of Loosing* menyatakan: “*You lose your wealth, you lose nothing; You lose your health, you lose something; You lose your character, you lose everything*”. Terinspirasi dari Pirous ini, pertanyaan selanjutnya adalah apa, mengapa dan bagaimana pendidikan karakter itu?

Pertanyaan tersebut mengingatkan kita untuk (kembali) menggaungkan pendidikan karakter. Sebetulnya ada beberapa terminologi, meskipun beberapa di antaranya sudah lawas, namun masih relevan diajukan untuk menguatkan *passion* kita membenahi pendidikan karakter, misalnya Pendidikan Moral, Pendidikan Nilai, Pendidikan Religius, Pendidikan Budi Pekerti, dan Pendidikan Karakter itu sendiri (lihat juga Syarbaini dkk, 2006). Penamaan ini kadang digunakan secara saling bertukaran (*inter-exchanging*), misal pendidikan karakter juga merupakan pendidikan nilai atau pendidikan religius itu sendiri (Kirschenbaum, 2000 dalam Segara, 2014). Sedangkan Gea (2003) menyebutkan pendidikan karakter itu harus dimulai dari kemampuan mengenal diri sendiri, sesama, Tuhan dan lingkungannya.

Namun yang terpenting adalah bagaimana desain dari pendidikan karakter tersebut sehingga menjadi sesuatu yang mudah diinternalisasikan. Kita bisa mulai dengan menyisir substansi atau kontennya, merancang pendekatan yang dilakukan dan mengeksplorasi metodologinya. Kajian akademik seperti ini menjadi penting mengingat istilah “karakter” itu sendiri paling tidak memuat dua hal, yaitu *values* (nilai-nilai) dan kepribadian. Suatu karakter merupakan cerminan dari nilai apa yang melekat dalam sebuah entitas. “Karakter yang baik” pada gilirannya adalah suatu gambaran dari nilai yang baik pula yang dimiliki oleh orang atau sesuatu, di luar persoalan apakah “baik” sebagai sesuatu yang “asli”, *genuine* ataukah sekadar kamuflese.

Berdasarkan perspektif tersebut, kajian terhadap pendidikan karakter akan berintersepsi dengan filsafat moral atau etika yang bersifat universal, salah satunya kejujuran. Pendek alasan, persoalan tentang baik dan buruk, kebajikan-kebajikan, dan keutamaan-keutamaan menjadi aspek penting dalam pendidikan karakter. Dengan demikian, pendidikan karakter dapat kita sederhanakan sebagai keunikan yang melekat pada individu, kelompok, masyarakat atau bangsa yang dilaksanakan melalui proses berkelanjutan dan tak

pernah berakhir (*never ending process*). Lalu, bagaimana pendidikan karakter yang ideal?

Dari prolog singkat di atas, pendidikan karakter hendaknya mencakup aspek pembentukan kepribadian yang memuat dimensi nilai-nilai kebajikan universal dan kesadaran kultural di mana norma-norma kehidupan itu tumbuh dan berkembang. Artinya pula, pendidikan karakter harus membuat kesadaran transendental individu terejawantahkan ke dalam perilaku yang konstruktif berdasarkan konteks kehidupan di mana ia mengada; memiliki kesadaran global, namun mampu bertindak sesuai konteks lokalitas. Kebajikan seperti ini oleh Muhaimin (2009) dianggap sebagai bagian dari pembinaan karakter bangsa.

Selain itu, pendidikan karakter menurut Lickona (1992) dalam Segara (2014) menekankan pentingnya tiga komponen karakter yang baik: *moral knowing* (pengetahuan tentang moral), *moral feeling* (perasaan tentang moral) dan *moral action* (perbuatan moral). Tiga komponen ini dibutuhkan agar anak atau peserta didik di sekolah misalnya, mampu memahami, merasakan dan sekaligus mengerjakan nilai-nilai kebajikan. Dari sini pula kita akhirnya dapat mengerti penyebab ketidakmampuan seseorang untuk berperilaku baik, walaupun secara kognitif ia sangat mengetahuinya, karena ia tidak terlatih untuk melakukan kebajikan. Untuk itu, para orang tua, juga guru tidak cukup memberikan pengetahuan tentang kebaikan, namun harus mampu menuntun seorang anak sampai ke tingkat praktik dalam kehidupan sehari-hari.

Seturut dengan Lickona, dalam pendidikan, terkhusus pendidikan agama, tiga komponen tersebut dapat menjadi inspirasi untuk tidak saja menanamkan karakter tetapi sekaligus bagaimana menginternalisasikannya dalam kehidupan konkret peserta didik, bahkan sejak mereka mengenyam pendidikan usia dini. Secara rinci, tiga komponen itu dapat dijelaskan, *pertama*, *moral knowing* sejak awal memang penting untuk diajarkan, di mana akan memuat paling tidak enam hal, yaitu *moral awareness* (kesadaran moral), *knowing moral values* (mengetahui nilai-nilai moral), *perspective taking*, *moral reasoning*, *decision making* dan *self knowledge*.

Kedua, *moral feeling* adalah aspek lain yang harus ditanamkan kepada anak yang merupakan sumber energi diri manusia untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Dalam *moral feeling* memuat enam aspek emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia berkarakter, yaitu *conscience* (nurani), *self esteem* (percaya diri), *empathy* (merasakan penderitaan orang lain), *loving the good* (mencintai kebenaran), *self control* (mampu mengontrol diri) dan *humility* (kerendahan hati).

Ketiga, *moral action* adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan yang konkret. Perbuatan moral ini merupakan hasil dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik (*act morally*), maka harus dilihat tiga aspek lain dari karakter, yaitu kompetensi (*competence*), keinginan (*will*) dan kebiasaan (*habit*).

Agar tiga komponen tersebut dapat “diajarkan” dan “dididikkan” kepada peserta didik, maka dunia pendidikan juga

harus menyediakan ranahnya. Ide ini penting mengingat secara psikologis, karakter individu (baca: peserta didik) dapat dimaknai sebagai hasil keterpaduan empat bagian, yakni olah hati, olah pikir, olah raga, olah rasa dan karsa.

Olah hati berkenaan dengan perasaan sikap dan keyakinan/keimanan. Olah pikir berkenaan dengan proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif. Olah raga berkenaan dengan proses persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas. Olah rasa dan karsa berkenaan dengan kemauan dan kreativitas yang tecermin dalam kepedulian, pencitraan, dan penciptaan kebaruan.

Perjumpaan yang berinterpedensi antara olah hati, olah pikir, olah raga, olah rasa dan karsa akan membantu kita untuk menarasikan dengan jernih bahwa *pertama*, karakter yang bersumber dari olah hati adalah beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. *Kedua*, karakter yang bersumber dari olah pikir adalah cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, produktif, berorientasi ipteks, dan reflektif.

Ketiga, karakter yang bersumber dari olah raga/kinestetika antara lain bersih, dan sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih, dan *keempat*, karakter yang bersumber dari olah rasa dan karsa antara lain kemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat, toleran, nasionalis, peduli, kosmopolit (mendunia), mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air (patriotis), bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja.

2.2 Pendidikan Karakter dalam Hindu: belajar dari tokoh cerita

Tidak mudah menarasikan dengan tepat apa yang dimaksud transformasi pendidikan karakter dalam pembelajaran yang holistik, terlebih untuk anak sekolah dasar, kecuali hanya untuk mensimplikasi persoalan yang tidak bisa dijawab. Padahal sistem pendidikan nasional, pembelajaran yang holistik dan terintegrasi juga sudah dimasukkan ke dalam konten dan metode pembelajaran Kurikulum 2013 (lihat juga Tim, 2009). Namun deskripsi tentang pendidikan karakter yang telah dipaparkan di atas, dapat menjadi inspirasi, bahkan diadopsi untuk melakukan habituasi pendidikan yang holistik. Agar fokus, dan mengingat sebagian definisi pendidikan karakter sudah dijelaskan, sub ini mengelaborasi pendidikan karakter hanya dalam wiracarita yang jamak mengemaskan pendidikan-pendidikan karakter.

Pendidikan karakter Hindu tercecir dalam banyak epos dan purana. Kita bisa mulai dari Ramayana, bahkan pengarangnya sendiri, Rsi Walmiki adalah contoh manusia berkarakter ketika ia menyadari kesalahannya saat menjadi Ratnakara lalu menjadi lebih baik. Begitu juga Wibhisana, saat kekuasaan Rahwana runtuh, ia menjadi tokoh yang merepresentasikan karakter yang kuat, tidak saja

raga tetapi mentalnya. Karena alasan itulah, ia terpilih mendapatkan Rama Asta Bratha.

Walmiki juga melapisi sembilan tokoh kuncinya dengan karakter-karakter yang kuat. Misalnya, Dasarata dianggap memiliki kemampuan mengendalikan 10 indria; Kausalya sebagai pemberi kesejahteraan yang adil; Kaikayi adalah simbol kejujuran dan kebenaran; Sumitra menjadi orang yang memperkuat persaudaraan, kesatuan dan persatuan; Rama sebagai pelindung peradaban dan semesta; Barata memiliki rasa tanggung jawab yang tulus untuk kelangsungan kehidupan; Laksmana adalah pengabdikan berkomitmen tinggi untuk agama dan negara; Satrugena adalah solutif bagi keuntungan semua pihak; dan Sita adalah wujud kesetiaan untuk menegakkan dharma (Sutantra, 2012:17). Bagaimana dengan Mahabharata?

Berkelindan dengan Ramayana, Sutantra (2012:19-20) juga menggambarkan Panca Pandawa dengan *nyasa* atau *niasanya* masing-masing. Pandhita adalah *niasa* moral dan karakter untuk Yudistira; Giri adalah *niasa* moral dan karakter untuk Bhima; Jaya adalah *niasa* moral dan karakter untuk Arjuna; Nala adalah *niasa* moral dan karakter untuk Nakula; dan Aji adalah *niasa* moral dan karakter untuk Sahadewa. Namun kelima *niasa* tersebut berada dalam diri sang sutradara Mahabharata, Krishna.

Tentu saja masih banyak tokoh lain yang menggambarkan betapa karakter kuat menjadi modal sosial yang berharga dalam melakoni kehidupan. Sebut saja Karna atau Ekalawya. Bahkan dalam Adiparwa, juga diceritakan bagaimana Bhagawan Domya ketika menyeleksi Sang Weda, Utamanyu dan Arunika sebelum benar-benar diterima sebagai murid terpilih sang bhagawan. Dalam Siwa Ratri Kalpa kita juga menemukan Lubdaka, yang mirip Walmiki menemukan kebenaran sejati justru di jalan yang sesat. Pun dalam Purana kita dapati banyak sekali tokoh berkarakter, seperti Dewi Sabhari, Tulsidas, dll. Tentu saja, beberapa tokoh nyata, macam Mahatma Gandhi, Swami Wiwekanada, dan para filosof Hindu lainnya, ajaran etika dan moralitasnya juga dapat ditransformasikan dalam pendidikan karakter.

Hampir semua karakter tokoh tersebut berdiri megah di atas pondasi budi pekerti. Titib (2003) meyakini bahwa agama adalah sumber pendidikan budi pekerti, dan pendidikan budi pekerti adalah sumber pembentukan manusia-manusia Hindu berkarakter. Titib (2003:19), mengutip Swami Sathya Narayana (2000) yang menyatakan bahwa tujuan pengetahuan adalah kearifan; tujuan peradaban adalah kesempurnaan; tujuan kebijaksanaan adalah kebebasan; dan tujuan pendidikan adalah karakter yang baik. Inilah yang dimaksud *character building*. Titib (2003:23) lalu merangkum pendidikan budi pekerti dan *character building* sebagai berikut:

“Pendidikan budi pekerti adalah pendidikan moralitas atau ketatasusilaan yang sangat berguna bagi seorang anak ketika anak tersebut telah menjadi dewasa. Pendidikan budi pekerti bertujuan untuk membangun karakter seorang anak, untuk menjadi anak yang baik, yang memancarkan sifat-sifat yang luhur, yakni sifat kedewasaan.....Sumber utama ajaran atau materi pendidikan budi pekerti adalah ajaran agama, di samping keteladanan dari kedua orang tua, kakak-kakak atau

saudaranya yang lebih tua, para guru di sekolah, dan tokoh-tokoh agama serta masyarakat”.

2.3 Pasraman Formal sebagai Salah Satu Wahana

Berbagai kisah dalam wiracarita di atas memberikan simpulan bahwa tiap orang sebetulnya memiliki orientasi untuk mengembangkan kemampuannya secara liyan. Situasi ini juga sudah lama dicermati Howard Gardner, sebagaimana panjang lebar dijelaskan Santrock (2007) dalam Segara (2013:61) yang mengembangkan *multiple intelligences*. Agak muskil seluruh kemampuan penting, populer disebut kompetensi bisa diberdayakan secara beririsan, mengingat setiap individu memiliki keunikan dan kekhasan serta jangan lupa pengaruh besar dari lingkungan tempatnya mengada. Namun yang pasti, setiap kompetensi itu bisa dikembangkan secara maksimal. Meminjam teori Blumberg dan Pringle, seperti dijelaskan Robbins (1996) dalam Segara (2013:58-56), kompetensi manusia yang berkinerja tinggi secara sederhana dirumuskan dengan $C = A \times M \times O$, yang berarti bahwa *competency* (kompetensi) bisa terwujud jika terdapat sinergi dari *ability*, *motivation* dan *opportunity*.

Pembelajaran berbasis pendidikan karakter yang holistik dalam pendidikan Hindu hanya bisa dilakukan melalui mekanisme khusus, jika perlu dengan *extra-ordinary act*. Kehadiran pendidikan keagamaan Pasraman Formal menjadi satu jawaban yang dapat dijadikan tungku melahirkan SDM Hindu yang komplit. Semangat ini bisa dibaca dengan struktur kurikulumnya yang menggunakan timbangan 40% matapelajaran umum dan 60% matapelajaran agama Hindu. Porsi ini berbanding lurus dengan gagasan KH. Dewantara yang menyatakan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran dan tubuh anak (2004:14).

Berdasarkan struktur kurikulum tersebut, mereka, para peserta didik itu, ketika belajar di Pasraman Formal tidak dipaksa menjadi seekor kuda dengan kacamatanya yang sempit tetapi juga berwawasan nasional. Tujuan utama melahirkan SDM Hindu yang tidak saja luas pengetahuan, tetapi juga luwes, menjadi alasan umat Hindu bergairah menyelenggarakan sistem pendidikan yang di dalamnya menjunjung tinggi moral dan etika (lihat tabel). Antusiasme untuk merealisasikan keinginan ini dapat dibaca dalam penelitian Segara, dkk (2015) yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Indonesia sudah siap menyelenggarakan pendidikan keagamaan Hindu.

Tabel: Total Tatap Muka Matapelajaran Keagamaan Seluruh Jenjang Per Tahun

NO	MAPEL	JUMLAH TATAP MUKA KELAS PER TAHUN												TOTAL
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Weda	33	34	68	68	68	58	66	68	58	66	68	58	713
2	Tatwa	33	34	34	34	34	34	33	34	29	66	68	58	491
3	Etika	132	136	136	136	136	114	66	68	58	66	68	58	1.176
4	Acara	66	68	68	68	68	58	33	34	29	33	34	29	588
5	Itihasa	66	68	68	68	68	58	33	34	29	33	34	29	588
6	Purana	66	68	68	68	68	58	33	34	29	33	34	29	588
7	Sejarah Agama Hindu	66	68	68	68	68	58	33	34	29	33	34	29	588
8	a. Sanskerta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	68	58	192
	b. Kawi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	34	29	96
9	Yoga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	68	58	192
Total		462	476	510	510	510	440	297	306	261	495	510	435	5.212

Sumber: Direktorat Pendidikan Agama Hindu, Ditjen Bimas Hindu, 2015

Melalui Pasraman Formal, kemampuan-kemampuan penting (kompetensi) manusia bisa diasah dan dikembangkan, sebagaimana telah diyakini Blumberg dan Gardner, terlebih konsepnya mengikuti sistem pasraman seperti masu masa lalu. Guru (*acarya*) dan siswa (*brahmacari*) tinggal bersama. Hubungan *guru-sisya* berlangsung alamiah dengan lingkungan yang didesain seperti bayangan Delors (1998:86) di mana peserta didik *learning to know, learning to do, learning to be* dan *learning to live together*. Gagasan ini sejalan juga dengan pikiran Paulo Freire dalam Tilaar dan Nugroho (2009:52) yang menyatakan bahwa pendidikan itu sesungguhnya proses pemerdekaan atau kesadaran akan kebebasan manusia yang memiliki potensi-potensi tertentu dalam hidupnya berhadapan dengan alam sekitarnya. Pola pendidikan Pasraman Formal berkelindan pula dengan pendidikan nasional yang diartikulasikan ke dalam Kurikulum 2013 yang pembelajarannya lebih banyak berbasis aktivitas, bukan pengekanan.

Tentu saja, Pasraman Formal hanyalah salah satu wahana untuk mewujudkan keinginan besar umat Hindu, karena selebihnya harus juga diserahkan pada partisipasi umat Hindu melalui pendidikan keagamaan lainnya. Namun paling tidak, melalui Pasraman Formal, kualitas pembelajaran dapat dimonitoring optimal karena selain disubsidi APBN juga partisipasi orang tua, guru dan masyarakat terlibat langsung. Di dalam Pasraman Formal, tiga jalan untuk menghasilkan manusia berkualitas bisa dilakukan, melalui *pertama, Ahara* artinya membangun hidup yang berkualitas hendaknya diawali dengan memperoleh dan mengolah makanan yang didapat dengan jalan dharma. Asupan makanan yang diperoleh dari hasil adharma seperti mencuri, menipu, dan korupsi dapat menutup hati nurani hingga menjadi gelap. Jika demikian, manusia akan gampang dikuasai sifat keraksasaan. Di Pasraman Formal, *ahara* diimplementasikan ketika *guru-sisya* bercocok tanam dengan mengambil dan mengolah makanan yang disediakan alam.

Kedua, Vihara artinya membina sikap hidup yang mendatangkan kebahagiaan lahir dan batin (*mokshartam jagat hita*) yang dilakukan melalui dua cara, yakni ilmu pengetahuan spiritual untuk melaksanakan dharma dan mencapai moksha, serta ilmu pengetahuan untuk memperoleh harta benda. Jika keduanya dilakukan dengan tidak menyimpang dari jalan dharma, kesempurnaan hidup akan didapat.

Ketiga, Ausada yaitu usaha untuk memelihara dan merawat kesehatan jasmani dan rohani, baik fisik maupun mental. Ada banyak cara yang dapat dilakukan, yakni menjadikan ajaran kesusilaan Hindu sebagai jalan hidup, seperti *panca yama wrata* (lima cara pengendalian diri), *catur paramita* (empat kebajikan hidup), dan *tri kaya parisudha* (tiga perbuatan [*kayika, wacika, manacika*] yang bersih dan suci).

III. PENUTUP

Pendidikan karakter adalah kebutuhan fundamental bagi sebuah bangsa, yang jika bangsa itu ingin kuat, mutlak memerlukan karakter manusia yang menghidupnya. Masalahnya, substansi pendidikan karakter tidak mudah diurai batasannya, sehingga banyak terminologi yang juga membutuhkan penjelasan. Kesulitan berikutnya, bagaimana mendidiknya menjadi sesuatu yang konkrit, hingga menginternalisasi dalam setiap raga dan sukma anak didik. Untuk maksud ini, pada akhirnya kita sedang tidak menyoal substansi semata, tetapi juga tentang metode dan strategi pembelajarannya, serta tak kalah penting orang yang tepat untuk melakukan transformasi. Sejumlah masalah seperti ini juga jamak ditemukan dalam literatur. Tema bagaimana transformasinya dalam dunia pendidikan, terlebih bagi anak sekolah dasar perlu kajian akademik yang mendalam. Artikel ini hanya memberi *insight* ringan yang terinspirasi dari berbagai penekun pendidikan karakter, sehingga juga tidak sungguh-sungguh mampu menjawab tema sentral tersebut. Namun paling tidak, dalam pendidikan keagamaan, dan juga pada akhirnya dalam pendidikan nasional, pendidikan karakter bukan hal yang benar-benar anyar. Yang menjadi masalah adalah substansi ini belum dieksplorasi dengan utuh, lalu terorganisir dan tersistematisasi, sehingga akhirnya menjadi remang-remang, kalau tidak imajinatif.

Agar mudah memasuki apa dan bagaimana pendidikan karakter, artikel ini mendorong kita untuk memetik simpul-simpul pendidikan karakter yang ditampilkan para tokoh nyata maupun yang tersebar dibanyak cerita, dari Itihasa, Purana dan lakon lainnya. Bahkan karakter-karakter tersebut seolah masih terus hidup senafas dengan tantangan jaman hingga hari ini. Keinginan untuk menjadikan pendidikan karakter sebagai habitus “baru” dalam pendidikan keagamaan terwadahi dengan salah satunya kehadiran Pasraman Formal. Melalui payung hukum PMA 56/2014, umat Hindu punya peluang besar untuk mewujudkan mimpi besar lahirnya manusia-manusia Hindu yang berkarakter dan berintegritas tetapi sekaligus beriman dan religius. Jika tidak sekarang mewujudkan cita-cita tersebut, momentum emas melalui Pasraman Formal akan lewat begitu saja [*]

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- CST Kansil. 1979. *Pancasila dan UUD 1945: Pendidikan Moral Pancasila*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Delors, Jacques. 1998. *Learning: The Treasure Within*. Paris: UNESCO.
- Dewantara, KH. 2004. *Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Fatah, T.I. dan Bung Slamet Hardani. 2011. *Membumikan Pancasila*. Jakarta: Yayasan Proklamasi 17 Agustus 1945.
- Gea, Antonius Atosokhi, Antonina Panca Yuni Wulandari dan Yohanes Babari. 2003. *Character Building I, II, III, IV*. Jakarta: Gramedia.
- Segara, I Nyoman Yoga. 2013. *Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA)*. Jakarta: Itjen Press, Kementerian Agama.
- Syarbaini, Syahrial, dkk. 2006. *Membangun karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: University Press.
- Tilaar, H.A.T dan Riant Nugroho. 2009. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Titib, I Made. 2003. *Menumbuhkembangkan Pendidikan Budi Pekerti pada Anak*. Jakarta: PHDI Pusat.

Laporan Penelitian:

- Segara, I Nyoman Yoga, Ketut Budiawan, dan Putu Jaya A. Widhita. 2015. *Analisis Hubungan Persepsi dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kesiapan Pengelola Pasraman, Masyarakat dan Pemerintah dalam Mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014*. Jakarta: STAH DN Jakarta.
- Tim Peneliti. 2012. *Survei Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama.
- Tim. 2015. *Struktur Kurikulum dan Persebaran Mata Pelajaran Pasraman Formal*. Jakarta: Ditjen Bimas Hindu.

Jurnal/Majalah/Makalah:

- Muhaimin, Yahya A. *Pembinaan Karakter Bangsa (Character Building)*. Makalah Sarasehan Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter bangsa, Departemen Pendidikan Nasional, 14 Januari 2011
- Segara, I Nyoman Yoga. *Pendidikan Karakter, Pendidikan Pancasila*. Majalah Ikhlas Beramal Edisi 87 Juni 2014 ISSN 1979-2972. Pinmas, Kementerian Agama RI.
- Sutantra, I Nyoman. *Menembus Tantangan Global dengan Teknologi Bermoral dan Berkarakter*. Jurnal Pasupati Volume 1 Nomor 1 Jan-Juni 2012. STAHDN Jakarta.
- Tim. *Pemikiran Tentang Pendidikan Karakter Dalam Bingkai Utuh Sistem Pendidikan Nasional*. ALPTKI untuk Menteri Pendidikan Nasional RI, 2009.

Pedoman/Peraturan:

- Muin, Abdul, Munawiroh, Ta'rif, Husen Hasan Basri, I Nyoman Yoga Segara. 2012. *Pedoman Pendirian Pasraman Formal*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769).

Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional